

# **ANALISIS KINERJA PENERIMAAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI PADA APBD KOTA MANADO)**

**Stefanie Sarah Litamahuputty, Anderson Kumenaung, Krest Tolosang**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan,  
Universitas Sam Ratulangi, Manado  
Email: steey\_sarah@yahoo.com*

## **ABSTRAK**

Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana APBD merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rumusan Masalah yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah Bagaimana Kinerja Penerimaan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Manado. Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Penerimaan dan Belanja Daerah di Kota Manado selain itu juga untuk dapat mengetahui pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran daerah Kota Manado, mengetahui efisiensi dan efektivitas Keuangan Daerah di Kota Manado.

Kata Kunci : Kinerja, Keuangan Daerah, Kota Manado

## **ABSTRACT**

*One of the most important aspect in district autonomy implementation and decentralization that must be arranged carefully is the matter of regional monetary management as well as Regional income and spending budget (APBD). APBD is actually a district government's yearly monetary policy that was arranged based on the current regulations. Moreover, the problem statement that the researcher would like to answer in this papper is how is the performance of income and spending in Manado district government. Based on the problem statement mentioned on the above, the purpose of this research paper to find out the performance of Regional income and spending in Manado city as well as to find out the district's income growth and spending in Manado, and also to figure out the district income efficiency and effectiveness in Manado city.*

*Keywords: performance, regional monetary, Manado City*

## 1. PENDAHULUAN

Sistem Pemerintahan yang baik sangat diperlukan oleh suatu negara dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pelayanan publik baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Dengan berlakunya undang-undang 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan diri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber pendanaan yang dimiliki agar ketergantungan pemerintah daerah akan dana dari pusat berkurang. Disamping itu juga adanya tuntutan terhadap penciptaan kondisi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang rasional dan proporsional.

Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana APBD merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya, dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mudah dilakukan. Pada sisi lain APBD dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja.

Perkembangan APBD terutama dari sisi pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek (satu tahun) dengan asumsi bahwa perkembangan yang akan terjadi pada satu tahun ke depan relatif sama. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntable.

Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut *barang publik*, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Barang swasta adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar, yaitu melalui transaksi penjual dan pembeli. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya *kegagalan sistem pasar* (market failure). Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang/jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi dinikmati oleh orang lain.

Beberapa jenis barang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak seorang pun yang bersedia menghasilkannya atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta akan tetapi dalam jumlah yang terbatas, misalnya pertahanan, peradilan, dan sebagainya. Jenis barang tersebut dinamakan barang publik murni yang mempunyai 2 karakteristik utama, yaitu penggunaannya tidak bersaing (nonrivalry) dan tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian (non excludability). Oleh karena pihak swasta tidak mau menghasilkan barang publik murni maka pemerintahlah yang harus menghasilkannya agar kesejahteraan seluruh masyarakat dapat ditingkatkan.

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien, efektif dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah belum ada hasil yang memuaskan bagi masyarakat sekitar. Disamping itu terdapat banyak keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas.

**Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kota Manado Tahun 2012**

JENIS		ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN		1.016.132.814.862,00	1.037.498.574.726,00
Pendapatan Asli Daerah		171.028.198.384,00	178.178.828.932,00
Dana Perimbangan		667.501.880.128,00	687.357.369.949,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah		167.602.736.350,00	171.962.375.945,00
BELANJA			
1.	Belanja Tidak Langsung	639.745.010.125,00	607.973.434.437,00
	- Belanja Pegawai	616.031.185.341,00	592.901.643.897,00
	- Belanja Bunga	-	-
	- Belanja Subsidi	-	-
	- Belanja Hibah	21.758.235.000,00	13.907.012.500,00
	- Belanja Bantuan Sosial	675.589.784,00	223.750.000,00
	- Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	-	-
	- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	780.000.000,00	779.999.520,00
	- Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	161.028.520,00
2.	Belanja Langsung	380.611.800.819,00	321.740.545.543,20
	- Belanja Pegawai	60.080.512.637,00	54.003.132.311,00
	- Belanja Barang dan Jasa	127.525.561.564,00	105.440.136.945,00
	- Belanja Modal	193.005.726.618,00	162.297.276.287,20
<b>JUMLAH</b>		<b>1.020.356.810.944,00</b>	<b>929.713.979.980,20</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik kota Manado

Seperti yang terlihat pada tabel APBD di kota manado lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai daripada belanja modal atau untuk penggunaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat sangat kurang. Masalah ini sangatlah perlu untuk diperhatikan, agar pemerintah dapat lebih bijaksana dalam menggunakan Anggaran yang ada. Dilihat dari aspek masyarakat, dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatkan tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang lebih baik. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk bekerja lebih efisien, efektif dan transparan dalam melaporkan kinerja APBD, merealisasikan program kerja dan mempertanggungjawabkan dana yang ada seperti yang telah direncanakan oleh pemerintah pada awal tahun untuk kesejahteraan masyarakat di kota Manado.

Berdasarkan berbagi isu yang telah diuraikan, maka penelitian tentang Kinerja Penerimaan dan Belanja Daerah di kota Manado menarik untuk dilakukan.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut Bagaimanakah Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Manado?

## **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah di kota Manado

## **Kerangka Teoritis**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

APBD disusun dengan pendekatan Kinerja yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

## **Fungsi-Fungsi Anggaran Daerah**

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Otorisasi : Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan : Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan : Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi : Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi : Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi Stabilisasi : Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Sehubungan dengan hal tersebut maka seluruh penyelenggara pemerintah daerah supaya mengambil langkah-langkah untuk memperah dengan DPRD atas rancangan peraturan daerah cepat proses penyusunan dan pembahasan APBD agar persetujuan bersama antara Kepala Daerah tentang APBD dapat dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Tingkat Efisiensi dan Efektivitas dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan kegiatan masing-masing program dan kegiatannya bagi suatu instansi pemerintah. Oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah mempunyai kemampuan teknis secara efisien dan efektif dengan wawasan yang komprehensif dan proporsional.

## **Penelitian Terdahulu**

Recky Rotinsulu (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah, menunjukkan realisasi Penerimaan Daerah di kota Bitung senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2003-2008. Rata-rata tingkat pertumbuhan Penerimaan Daerah dari tahun 2003-2008 adalah sebesar 39,82% per tahun. Dan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di kota Bitung lebi banyak berada pada tingkat efisien. Dimana hanya pada tahun 2003 yang berada pada kriteria Cukup Efisien (81.95%) kemudian dari tahun 2004-2008 semuanya berada pada kriteria sangat efisien dengan rata-rata tingkat efisien untuk periode 2004-2008 adalah sebesar 43,15%.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa APBD Pemkot Manado yang didalamnya terdapat komponen-komponen: pendapatan daerah, belanja daerah, pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan hasil bukan pajak. Data APBD yang digunakan adalah berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2008-2012.

Sumber data diperoleh dari Bagian Keuangan Pemkot Manado, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Manado dan Biro Pusat Statistik Kota Manado.

## **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini dipakai dua pendekatan yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca dari berbagai buku literatur beserta referensi-referensi lainnya, termasuk hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh landasan teori yang mendukung analisis yang dilakukan.

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan dan menghimpun data dan informasi yang diperoleh dari Bagian Keuangan Pemkot Manado, Bappeda kota Manado dan Badan Pusat Statistik kota Manado. Cara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara pada pihak-pihak terkait untuk memberikan informasi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

## **Metode Analisis**

### **a) Analisis Deskriptif**

Metode (alat Analisa) yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini adalah metode analisis deskriptif tabel. Analisis ini digunakan untuk menganalisa grafik dan tabel yang ada.

### **b) Analisis Kinerja**

Analisis ini digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi, efektivitas dan pertumbuhan dari target dan realisasi penerimaan daerah secara total, pengeluaran daerah dan realisasi belanja operasional dalam proses pengelolaan keuangan daerah Pemerintahan Kota Manado dari tahun 2008-2012.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kota Manado**

Gambaran pertumbuhan penerimaan dan belanja daerah kota Manado selama periode tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 4.7.

Dari data pada tabel 4.7, dapat dianalisis tingkat pertumbuhan Penerimaan dan Belanja Daerah Kota Manado dari tahun 2008 sampai 2012. Pada sisi penerimaan dari tahun 2008 ke tahun 2009 terjadi penurunan sebesar 2,2%. Pada tahun 2010 penerimaan mengalami kenaikan sebesar 3,98% dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2011 terjadi kenaikan penerimaan yang cukup besar yaitu sebanyak 33,61% dari tahun 2010. Pada tahun 2012 kembali terjadi kenaikan penerimaan sebesar 15,4%. Dengan demikian selang periode tahun 2008 sampai tahun 2012 penerimaan daerah mengalami kenaikan rata-rata 12,7% per tahun.

**Tabel 2. Pertumbuhan Realisasi Penerimaan dan Belanja Daerah Kota Manado  
Periode tahun 2008 sampai 2012**

Tahun	Penerimaan (Rp)	Pertumbuhan (%)	Belanja (Rp)	Pertumbuhan (%)
2008	662.074.202.665	-	616.807.203.946	-
2009	647.169.850.697	-2,2%	693.742.305.984	12,47%
2010	672.960.863.401	3,98%	678.488.076.193	-2,19%
2011	899.152.955.866	33,61%	876.626.500.966	29,2%
2012	1.037.498.574.726	15,4%	929.713.979.980	6,05%

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Manado Tahun 2008-2012 (data diolah)*

Pada sisi Belanja Daerah terjadi kondisi yang hampir sama dengan posisi penerimaan daerah. Pada periode tahun 2008-2009 terjadi pertumbuhan Belanja Daerah sebesar 12,47%, kemudian untuk periode 2009-2010 mengalami penurunan sebesar 2,19%. Pada tahun 2010-2011 terjadi kenaikan presentase menjadi 29,2%. Pada periode selanjutnya 2011-2012 terjadi kenaikan kembali sebesar 6,05%. Dengan demikian selama periode tahun 2008 sampai tahun 2012 terjadi kenaikan rata-rata Belanja Daerah Kota Manado sebesar 11,38% per tahun.

#### **Analisis Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado**

Untuk menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah dilihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungannya adalah rasio antara Penerimaan Daerah dengan Belanja Operasional (Belanja Tidak Langsung), dimana semakin kecil rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan tersebut. Adapun formula yang digunakan dalam perhitungannya adalah :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Penerimaan}} \times 100\%$$

Dengan Menggunakan Formula tersebut, dapat diketahui tingkat efisiensi pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tampak pada tabel 4.8.

**Tabel 3. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado  
Tahun 2008-2012**

Tahun	Penerimaan (Rp)	Belanja Operasional (Rp)	Prosentase (%)
2008	662.074.202.665	347.693.432.895	52,51%
2009	647.169.850.697	424.994.024.741	65,66%
2010	672.960.863.401	475.460.069.159	70,65%
2011	899.152.955.866	554.781.774.977	61,70%
2012	1.037.498.574.726	607.973.434.437	58,59%

*Sumber: Data diolah*

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi Belanja Operasional dengan realisasi Penerimaan Daerah, maka tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah kota Manado dapat diberikan penilaian berdasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900.327 Tahun 1994 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan yang disusun sebagai berikut :

**Tabel 4. Kriteria Kinerja Keuangan**

<b>Presentasi Kinerja Keuangan</b>	<b>Kriteria</b>
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Dibawah dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Medi Setianus, 1996

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kota Manado lebih banyak berada pada tingkat efisien. Dimana hanya pada tahun 2008 (52,51%) dan 2012 (58,59%) yang berada pada kriteria Sangat Efisien, kemudian dari tahun 2009 (65,66%), 2010 (70,65%), dan 2011 (61,70%) berada pada tingkat efisien dengan rata-rata tingkat efisien untuk periode 2008-2011 adalah sebesar 66%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah kota Manado selang periode 2008-2011 telah dikelolah dengan efisien dan pada tahun 2012 telah dikelolah dengan baik dan berada pada kriteria Sangat Efisien.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Realisasi Penerimaan Daerah Kota Manado cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2008-2012. Hanya pada tahun 2009 mengalami sedikit penurunan sebesar 2,2%. Setelah itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Rata-rata tingkat pertumbuhan Penerimaan Daerah dari tahun 2008 sampai tahun 2012 adalah sebesar 12,7% per tahun.
2. Realisasi Belanja Daerah juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hanya saja pada tahun 2011 mengalami sedikit penurunan sebesar 7,72% dari tahun sebelumnya. Rata-rata tingkat pertumbuhan Belanja Daerah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 11,38%
3. Prosentase Belanja Tidak langsung (Operasional) terhadap total belanja Daerah masih relatif tinggi dengan rata-rata per tahun adalah sebesar 63,25%.
4. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kota Manado lebih banyak berada pada tingkat efisien. Dimana pada tahun 2008 (52,51%) dan tahun 2012 (58,59%) berada pada tingkat sangat efisien. Walaupun pada tahun 2009 sampai 2011 berada pada tingkat efisien tetapi pada tahun 2012 pengelolaan keuangan daerah kota Manado berada pada tingkat Sangat Efisien.
5. Berdasarkan Perhitungan efektivitas Berdasarkan perhitungan efektivitas pengelolaan keuangan daerah kota Manado, untuk tahun 2008 sampai tahun 2012 nampak bahwa tingkat efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado berkisar antara 95,31% sampai 102,10%. Tingkat efektivitas terendah terjadi pada tahun 2010 dimana tingkat efektivitasnya sebesar 95,31%, sedangkan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu tingkat efektivitasnya adalah 102,10%.

6. Berdasarkan perhitungan Efisiensi dan Efektivitas menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah di Kota Manado berada dalam kriteria Efektif dan Efisien.

## **SARAN**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam rumusan kesimpulan maka disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah kota Manado harus tetap meningkatkan penerimaan daerahnya terutama penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dengan upaya menggali dan mencari seluruh potensi sumber-sumber pendapatan di kota Manado.
2. Diharapkan prosentase Belanja Langsung (Belanja Pembangunan) terhadap total Belanja Daerah dapat ditingkatkan sehingga pembiayaan terhadap infrastruktur atau proyek-proyek terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dapat lebih maksimal.
3. Kinerja Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah yang dalam kriteria Efisien dan Efektif dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan menjadi sangat Efisien dan Sangat Efektif. Agar masyarakat dapat puas dengan kinerja Pemerintah dalam Pengelolaan APBD di kota Manado.

## DAFTAR PUSTAKA

- Mangkoesobroto Guritno**, 1993, Ekonomi Publik, UGM Yogyakarta.
- Rotinsulu Recky** 2010, Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung. Tesis S2 Program MEP-UNSRAT Manado.
- Mardiassmo**, 2004, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi – Yogyakarta.
- Lapian Agnes**, 2008, Kajian Evaluatif Pengeluaran Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Manado. UNSRAT
- Elim Inggriani**, 2007, Efisiensi dan Efektivitas Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tesis S2 Program MEP-UNSRAT Manado.
- Toding Margaretha**, 2010, Efisiensi dan Efektivitas Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Banggai, UNSRAT.
- Darise Nurlan**, 2006, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerbit Indeks Jakarta
- Devas, Binder Brian Nick, Booth Anne, Davey Kenneth and Kelly Roy**, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI-Press, Jakarta.
- Jhingan, M.L.** 1999, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, terjemahan D.Guritno. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Todaro, Michael P**, 2000, Pembangunan Ekonomi, Erlangga, Jakarta.